



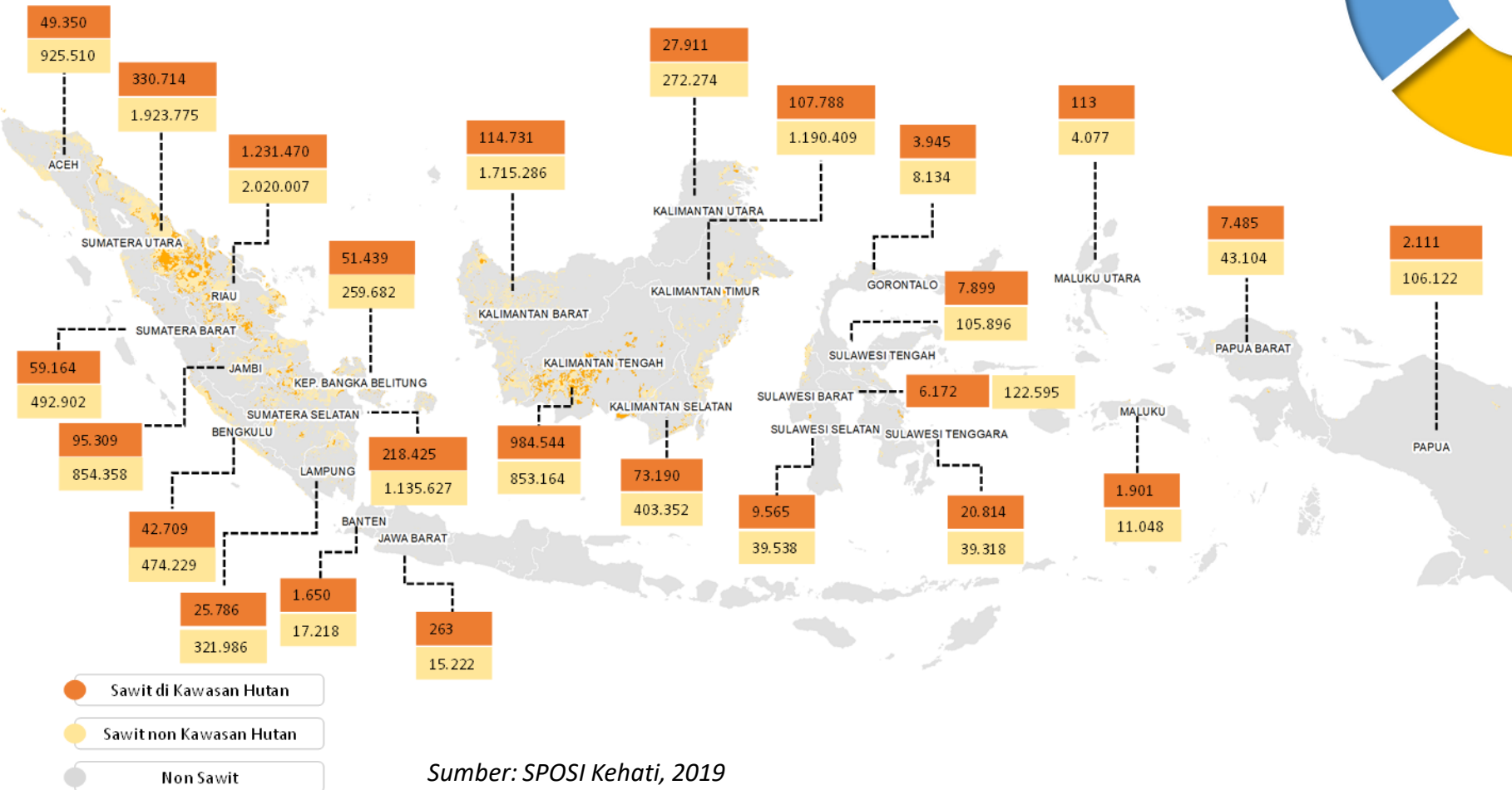
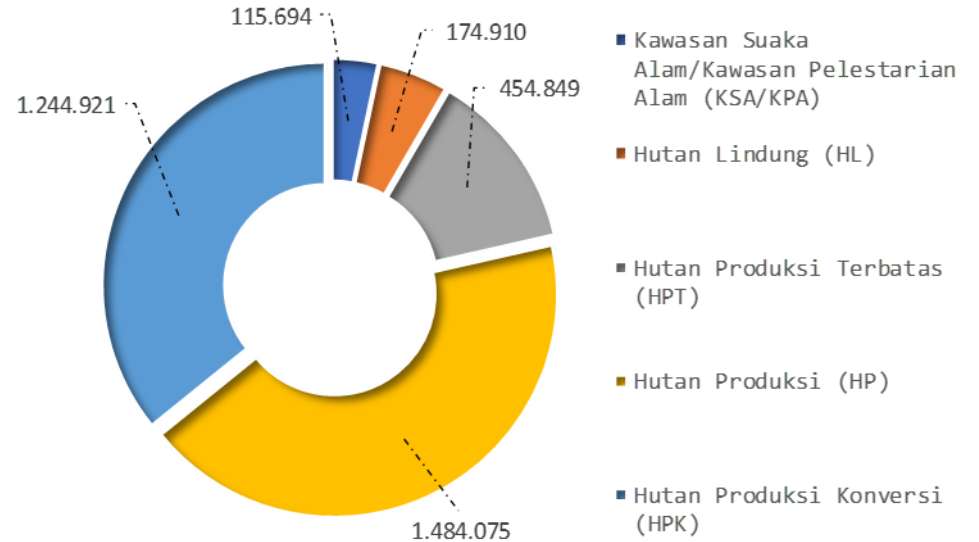
Dana Bagi Hasil (DBH)
Sawit untuk Perbaikan
Tata Kelola Perkebunan
Sawit Berkelanjutan

Wiko Saputra

PENDAHULUAN

- Forum Gubernur se-Sumatera (2011) dan Rapat Koordinasi **Provinsi Penghasil Sawit** (2020);
- **Desentralisasi** (*money follow function & money follow program*) dan **Bagi Hasil SDA** (*by origin, by production & by actual*);
- **Faktanya**: kapasitas fiskal rendah & beban tanggung jawab besar, masalah dampak ekologi, kemiskinan tinggi;
- Upaya pemerintah mewujudkan **tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan**;
- RUU **Hubungan Keuangan** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KONDISI PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA

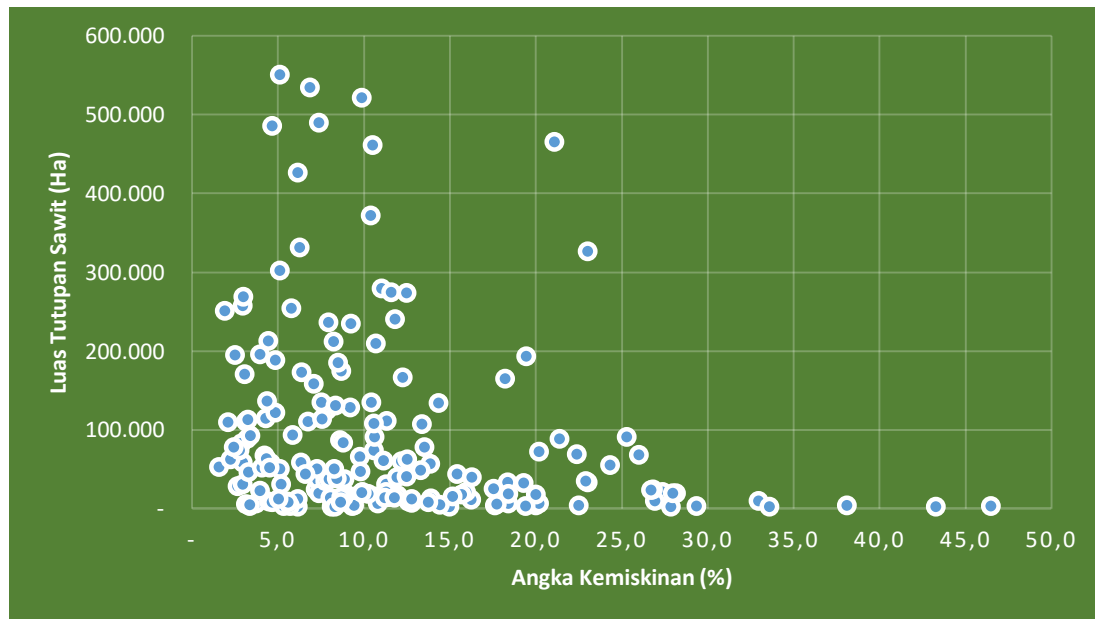


No	Kabupaten/Kota	Total dalam Kawasan Hutan (Ha)	Persen terhadap Total Kawasan Hutan
1	Kab. Kotawaringin Timur	318.527	9%
2	Kab. Rokan Hilir	283.582	8%
3	Kab. Rokan Hulu	224.961	6%
4	Kab. Seruyan	163.712	5%
5	Kab. Kampar	145.573	4%
6	Kab. Bengkalis	129.350	4%
7	Kab. Kotawaringin Barat	115.320	3%
8	Kab. Musi Banyuasin	113.162	3%
9	Kab. Indragiri Hulu	112.630	3%
10	Kab. Indragiri Hilir	94.214	3%
	Total	1.701.030	49%

Sumber: SPOSI Kehati, 2019

FAKTANYA

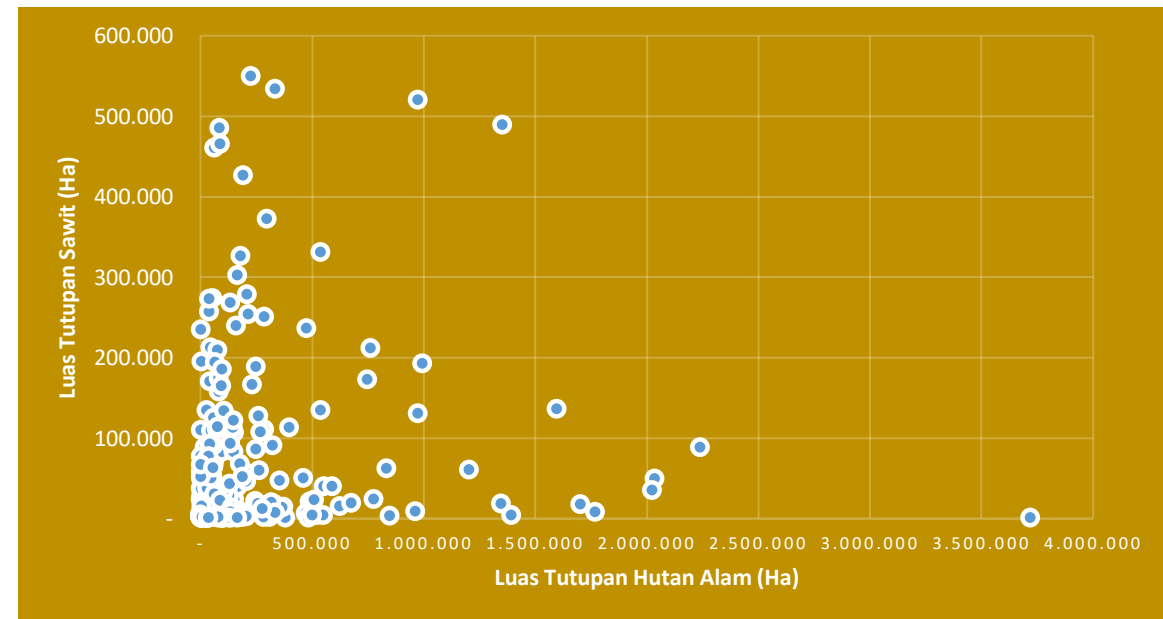
PERMASALAHAN KEMISKINAN



Sumber: BPS, 2019; Auriga, 2019 (diolah)

Kemisikinan masih tinggi di daerah-daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit di Indonesia

PERMASALAHAN RISIKO EKOLOGI



Sumber: Auriga, 2019 (diolah)

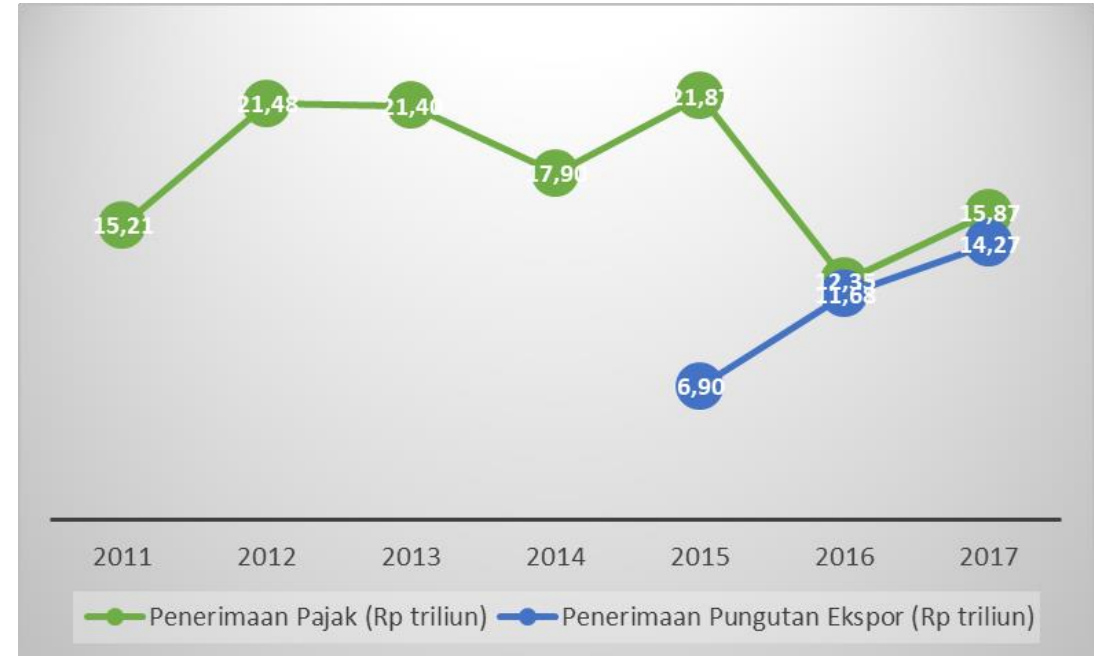
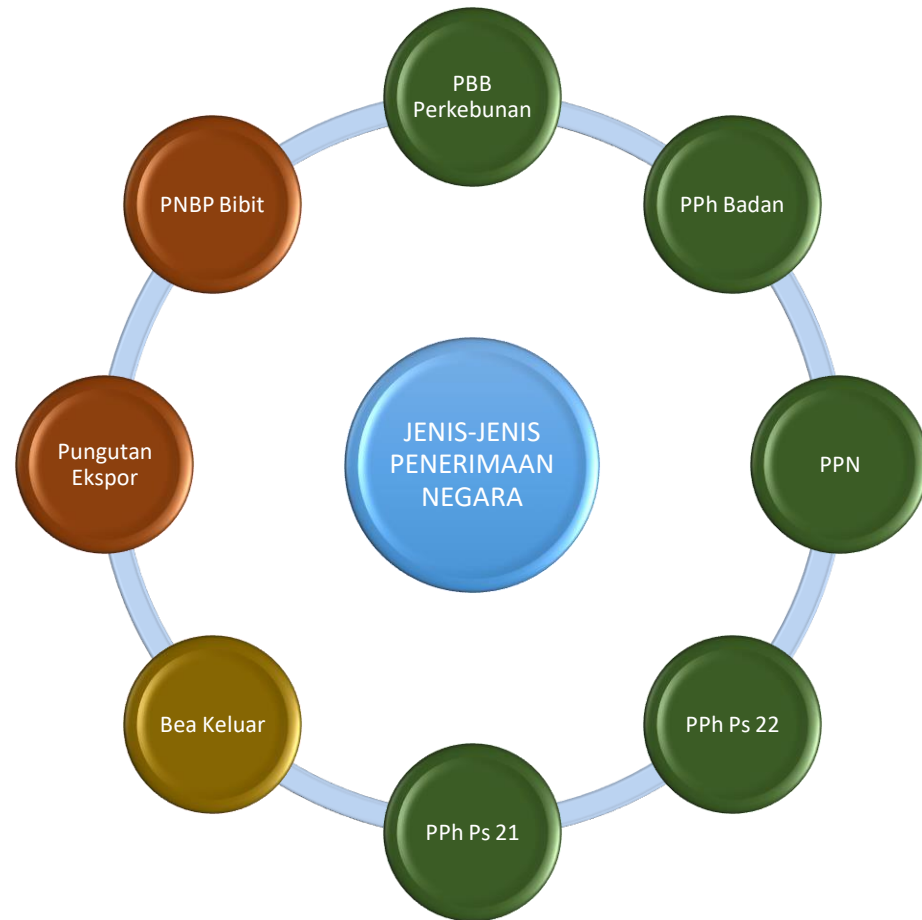
Ancaman dan risiko permasalahan ekologi masih sering terjadi di daerah-daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit di Indonesia

Dana Bagi Hasil-SDA

No	Jenis Penerimaan	UU. No. 33/2004			UU Otsus Papua dan UUPA (%)
		Pusat (%)	Propinsi (%)	Kab/Kota (%)	
1	Kehutanan				
	• Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	20	16	64	-
	• Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20	16	32	32
	• Dana Reboisasi	60	-	40	-
2	Pertambangan Umum				
	• Iuran tetap (Landrent)	20	16	64	-
	• Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty)	20	16	32	32
3	Perikanan	20	-	-	80
4	Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
5	Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
6	Panas Bumi	20	16	32	32

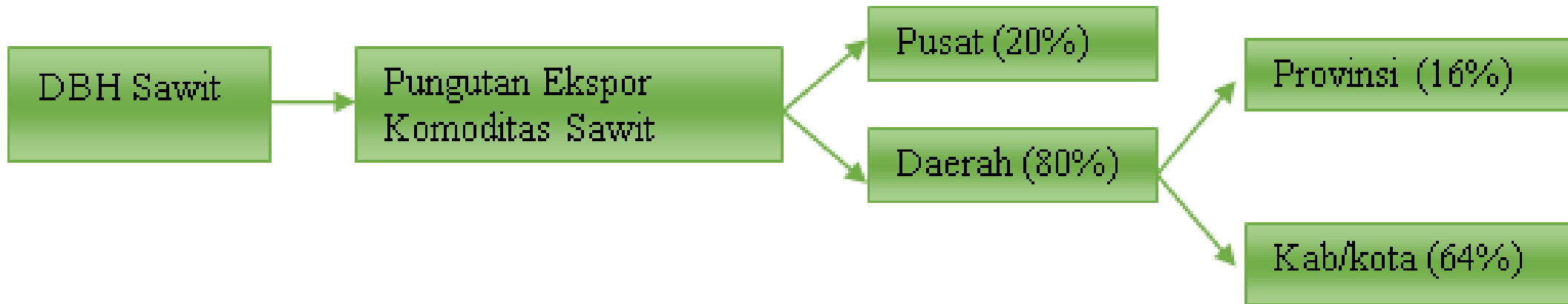
Sumber: DJPK, 2020

PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR SAWIT



Sumber: KPK, 2019

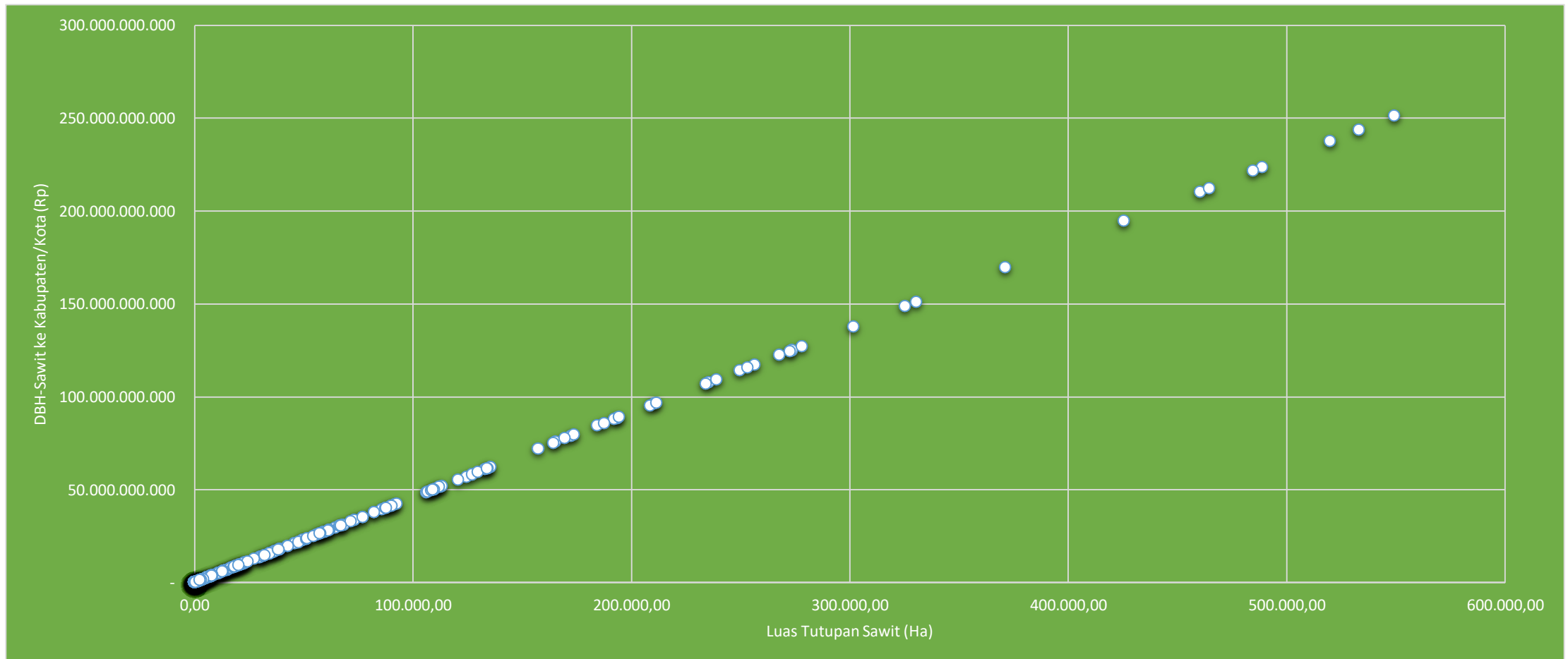
DANA BAGI HASIL - SAWIT



HASIL SIMULASI

No	Provinsi	Luas Tutupan Sawit (Ha)	Produksi CPO (Ton)	PNBP/Pungutan Ekspor (Rp)	DBH Sawit (Rp)		
					Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
1	Aceh	535.002	1.658.506	381.798.805.613	76.359.761.123	61.087.808.898	244.351.235.592
2	Sumatera Utara	2.079.027	6.444.984	1.483.676.744.081	296.735.348.816	237.388.279.053	949.553.116.212
3	Sumatera Barat	558.683	1.731.917	398.698.513.494	79.739.702.699	63.791.762.159	255.167.048.636
4	Riau	3.387.206	10.500.339	2.417.245.552.660	483.449.110.532	386.759.288.426	1.547.037.153.703
5	Kep. Riau	1.134.640	3.517.384	809.724.443.648	161.944.888.730	129.555.910.984	518.223.643.935
6	Jambi	426.508	1.322.175	304.373.151.847	60.874.630.369	48.699.704.295	194.798.817.182
7	Bengkulu	1.468.468	4.552.251	1.047.957.444.048	209.591.488.810	167.673.191.048	670.692.764.191
8	Sumatera Selatan	273.842	848.910	195.424.593.790	39.084.918.758	31.267.935.006	125.071.740.025
9	Kep. Bangka Belitung	4.926	15.271	3.515.390.441	703.078.088	562.462.470	2.249.849.882
10	Lampung	268.061	830.989	191.299.041.184	38.259.808.237	30.607.846.589	122.431.386.358
11	Banten	18.365	56.932	13.105.997.856	2.621.199.571	2.096.959.657	8.387.838.628
12	Jawa Barat	14.997	46.491	10.702.458.473	2.140.491.695	1.712.393.356	6.849.573.422
13	Kalimantan Barat	1.807.643	5.603.693	1.290.006.277.312	258.001.255.462	206.401.004.370	825.604.017.479
14	Kalimantan Tengah	1.778.702	5.513.976	1.269.352.823.244	253.870.564.649	203.096.451.719	812.385.806.876
15	Kalimantan Selatan	549.953	1.704.854	392.468.436.647	78.493.687.329	62.794.949.864	251.179.799.454
16	Kalimantan Timur	1.287.449	3.991.092	918.775.052.219	183.755.010.444	147.004.008.355	588.016.033.420
17	Kalimantan Utara	234.535	727.059	167.373.547.901	33.474.709.580	26.779.767.664	107.119.070.657
18	Sulawesi Selatan	31.980	99.138	22.822.205.905	4.564.441.181	3.651.552.945	14.606.211.779
19	Sulawesi Barat	155.958	483.470	111.297.860.804	22.259.572.161	17.807.657.729	71.230.630.914
20	Sulawesi Tengah	110.901	343.793	79.143.385.149	15.828.677.030	12.662.941.624	50.651.766.495
21	Sulawesi Tenggara	55.786	172.937	39.811.118.781	7.962.223.756	6.369.779.005	25.479.116.020
22	Gorontalo	11.257	34.897	8.033.445.024	1.606.689.005	1.285.351.204	5.141.404.815
23	Maluku	14.966	46.395	10.680.335.634	2.136.067.127	1.708.853.701	6.835.414.806
24	Maluku Utara	3.950	12.245	2.818.877.840	563.775.568	451.020.454	1.804.081.818
25	Papua Barat	58.656	181.834	41.859.265.464	8.371.853.093	6.697.482.474	26.789.929.897
26	Papua	110.496	342.538	78.854.360.965	15.770.872.193	12.616.697.754	50.466.791.018
		16.381.957	50.784.067	11.690.819.130.021	2.338.163.826.004	1.870.531.060.803	7.482.124.243.213

ALOKASI DBH-SAWIT MENURUT KABUPATEN/KOTA



REKOMENDASI

- **Memperbaiki kerangka regulasi terutama menyangkut kebijakan DBH.** Tanpa regulasi yang baik, DBH Sawit tidak bisa dilakukan. Dalam rangka itu, hadirnya rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi *entry point* dalam menyusun kerangka regulasi terkait DBH Sawit serta turunan regulasi lainnya.
- **Perlu mengembangkan sumber penerimaan negara yang akan dijadikan objek DBH Sawit.** Prioritas utamanya adalah PNBPN dari pungutan ekspor. Alasannya, selain jumlahnya besar dibanding penerimaan lain dari sawit, prinsipnya juga sesuai dengan DBH, karena basisnya adalah jumlah realisasi produksi yang diekspor. Meski pencatatan ekspornya ada di pelabuhan ekspor, namun bisa diproksi dengan jumlah produksi dan luas lahan perkebunan sawit yang terdapat di daerah penghasil. Oleh karena itu, perlu mereformasi tata kelola dana pungutan ekspor sawit tersebut sesuai dengan prinsip DBH Sumber Daya Alam yang ada saat ini.
- **Pemerintah perlu membangun indikator yang kredibel terkait mekanisme formulasi DBH Sawit.** Dalam kertas kebijakan ini, direkomendasikan basis datanya adalah luas tutupan sawit dan produksi CPO berdasarkan daerah penghasil. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan modifikasi dalam indikator DBH Sawit ke depannya, sesuai dengan prioritas tata kelola sawit di Indonesia, seperti luas lahan sawit di daerah yang sudah memiliki sertifikasi ISPO.
- **Pemerintah perlu mengatur mekanisme penggunaan dan pemanfaatan DBH Sawit oleh pemerintah daerah.** Hal ini penting, agar tujuan dari DBH Sawit, yaitu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam tata kelola sawit berkelanjutan dapat dicapai. Kertas kebijakan ini merekomendasikan penggunaan DBH Sawit hanya diperbolehkan untuk (1) peremajaan sawit rakyat, (2) peningkatan sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit, (3) pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit, (4) riset dan pengembangan sawit, dan (5) promosi sawit. Kegiatan dan program yang disusun oleh pemerintah daerah dengan menggunakan DBH Sawit harus mengacu kepada 5 agenda tersebut.
- **Pemerintah perlu membangun sistem transparan data.** Karena ini terkait dengan beberapa indikator yang digunakan dalam DBH Sawit, maka data dan formulasi yang digunakan harus terbuka ke publik sehingga pengawasan publik menjadi kuat dan penyelewengannya dana tidak terjadi.